

**PERAN PELAYANAN PARTISIPATIF DINAS
KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN
STUNTING DI KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA
TANJUNG BALAI**

SKRIPSI

Oleh:

NEYS

NPM : 2003100042

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : NEYS
NPM : 2003100042
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si** (.....)
PENGUJI II : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A** (.....)
PENGUJI III : **SYAFRUDDIN, S.Sos., MH** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.Si Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : NEYS
NPM : 2003100042
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Peran Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai

Medan, 03 Juni 2024

PEMBIMBING .



SYAFRUDDIN S.Sos., MH
NIDN. 0130056601

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S. Sos., M.SP
NIDN. 0122118801



DR. AKIFAN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN. 0030017402

PERNYATAAN



Dengan ini, saya Neys NPM 2003100042, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, *plagiat* atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang berlaku;
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya *plagiat*, atau karya jiplakan dari karya orang lain;
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 08 Juni 2024

Yang Menyatakan,



NEYS
2003100042

PERAN PELAYANAN PARTISIPATIF DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNG BALAI

NEYS
2003100042

ABSTRAK

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Oleh sebab itu Dinas Kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh kepada masyarakat termasuk pada program penanggulangan stunting. Dalam konteks program penanggulangan stunting, pelayanan partisipatif yang dilakukan Dinas Kesehatan yaitu dalam hal pengimplementaian berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam program penanggulangan stunting seperti halnya pemberian PMT. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan dalam penelitian ini sudah berjalan secara optimal. Dilihat dari adanya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dalam Program Penanggulangan Stunting melalui Puskesmas di Kecamatan Teluk Nibung sudah berjalan dengan baik. Namun diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi sejak hari pertama kehidupan bayi.

Kata Kunci: *Pelayanan, Partisipatif, Stunting*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada zaman peradaban yang terang benderang dan di penuhi oleh ilmu pengetahuan ini. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai” tepat waktu, guna memenuhi tugas skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh dan meraih gelar Sarjana Srata-1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada yang tercinta dan tersayang Ayahanda Rais dan Ibunda Netti yang selalu mendoakan disetiap langkah penulis dan memberi dukungan kepada penulis. Terima kasih telah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup penulis juga kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian. Terakhir terima kasih sudah berjuang keras dan memberikan yang terbaik untuk hidup penulis baik secara materi maupun dukungan moral sehingga bisa mengantarkan penulis berada di

posisi saat ini. Penulis sangat bersyukur dan bangga telah dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orangtua penulis. Serta tak lupa pula kepada yang terkasih adik-adik penulis Selpi, Yaya, Lisa, Putri dan keluarga penulis yang telah membantu, memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, dan tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.SP, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah S.Sos., M.Si, selaku sekretaris Program Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Syafruddin, S.Sos, MH, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan yang banyak dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Pegawai Staf Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini.
10. Ibu Dwi Rahmi Zaki, SKM, MPH selaku Kabid Kesehatan Masyarakat dan Ibu Rismawati, SST, M.K.M selaku Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi di Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Seluruh Staf di Kantor Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai dan para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada Agung Permana terima kasih sudah menjadi pendengar terbaik dan bersedia meluangkan waktunya menemani penulis dalam melakukan penelitian serta telah banyak memberi semangat dan motivasi sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan.
13. Teman-teman penulis Zahwa, Thasya, Ratna, Kak Bunga, Silmi, Nisa, Agnes yang membantu penulis dalam melakukan penelitian dan telah banyak memberikan semangat, arahan dan saran kepada penulis.

14. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kontribusinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

15. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyerah dan sudah bertahan sejauh ini dengan banyaknya masalah juga kendala dalam proses penyusunan skripsi. Ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada pada skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya Aamiin yaRabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 22 Mei 2024

Penulis

NEYS

2003100042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Hubungan Antara Administrasi Publik Dengan Pelayanan Publik.....	8
2.2 Pengertian Administrasi Publik.....	9
2.3 Pelayanan	10
2.3.1 Pengertian Pelayanan	10
2.3.2 Pengertian Pelayanan Publik.....	11
2.4 Partisipatif	12
2.4.1 Pengertian Partisipatif	12
2.4.2 Jenis Partisipatif	14
2.5 Stunting	15
2.5.1 Pengertian Stunting	15
2.5.2 Penyebab Stunting.....	17
2.5.3 Dampak Stunting.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Kerangka Konsep	19
3.3 Definisi Konsep.....	20
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	21

3.5	Informan/Narasumber	21
3.6	Teknik Pengumpulan Data	23
3.7	Teknik Analisis Data	24
3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.9	Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	26
3.9.1	Gambaran Umum	26
3.9.2	Visi Misi dan Motto Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai.....	27
3.9.3	Maklumat Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai	28
3.9.4	Tupoksi KADIS, Kabid Kesmas, Kasi Kesga & Gizi.....	29
3.9.5	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Hasil Penelitian	35
4.1.1	Adanya Pelayanan	36
4.1.2	Adanya Koordinasi.....	37
4.1.3	Adanya Tanggung Jawab	38
4.1.4	Adanya Keterlibatan/ Kontribusi	39
4.2	Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP.....		44
5.1	Simpulan	44
5.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN.....		49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	20
Gambar 3.2 Peta Kota Tanjung Balai	27
Gambar 3.3 Struktur Organisasi.....	35
Gambar 4.1 Data Balita Stunting Kota Tanjung Balai.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran II	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran III	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
Lampiran IV	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran V	: SK-4 Undangan Panggilan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK- 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VII	: Pedoman Wawancara
Lampiran VIII	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran IX	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran X	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XI	: Surat LoA KESKAP
Lampiran XII	: SK- 10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XIII	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan makanan yang tidak cukup dalam waktu yang cukup lama karena pemberian makanan yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Stunting dapat terjadi sejak janin dalam kandungan dan baru muncul saat anak berusia dua tahun. Jika asupan gizi tidak diimbangi dengan catch-up growth (tumbuh kejar), yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan, stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya resiko kematian.

Stunting masih menjadi isu kesehatan di Indonesia yang dapat memberi dampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan, sehingga kasus ini harus segera diselesaikan. Stunting adalah keadaan jika tinggi badan balita di bawah minus dua deviasi berdasarkan standar WHO. Keadaan ini terjadi akibat janin gagal tumbuh terutama pada masa kehamilan yang dapat disebabkan Ibu hamil mengalami kekurangan gizi atau menderita penyakit menular dan setelah lahir tidak mendapat nutrisi yang cukup terutama pada 1000 hari pertama kehidupan.

Penanganan dan pencegahan stunting adalah tanggung jawab semua pemerintah pusat, daerah, dan keluarga. Tidak hanya Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab. Terapi nutrisi khusus dan intervensi sensitif adalah salah satu dari banyak cara untuk mencegah dan menanggulangi stunting. Sektor kesehatan berfokus pada perawatan diet khusus untuk ibu hamil dan balita,

terutama selama seribu hari pertama kehidupan mereka. Ibu hamil memerlukan diet tambahan untuk mengurangi kekurangan protein, zat besi asam folat, dan yodium, mengobati cacangan, dan melindungi dari malaria.

Pembangunan kesehatan di Indonesia merupakan prioritas dan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa. Pembangunan kesehatan di Indonesia secara tegas telah dirumuskan dalam berbagai dokumen kebijakan publik, baik untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20 tahun (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahun (RPJMN), Rencana Strategik Kementerian Lembaga Bidang Kesehatan 5 tahun (Renstra KL), dan Rencana Kerja Pemerintah tahunan (RKP).

Dalam peraturan perundang-undangan, setiap lembaga negara memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Semua lembaga pemerintah memiliki tujuan yang sama: memajukan negara dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan memberikan layanan sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan dan menyesuaikan keinginan masyarakat.

Salah satu bagian dari otonomi daerah dalam bidang kesehatan adalah dinas kesehatan, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan urusan kesehatan termasuk surveilans kesehatan, pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Sampai tahun 2022, jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Teluk Nibung yang ada antara lain : Puskesmas 2 unit, Puskesmas pembantu 4 unit, Pos Kesehatan Kelurahan 3 Unit, Poliklinik 1 unit, Praktik Dokter 1 unit, Praktik Bidan 15 unit, dan 25 Posyandu yang tersebar di tiap Kelurahan. (Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, 2023)

Fenomena yang terjadi berdasarkan EPPGBM (elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada bulan Oktober 2023 di kota Tanjungbalai terdapat 92 anak yg terkena stunting. dari 8.053 jumlah anak yg di ukur, dengan hasil 7.949 anak normal dan 12 anak dengan kategori tinggi.

Untuk menangani masalah kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, bertanggung jawab atas administrasi, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan, evaluasi dan pelaporan, dan fungsi lain yang terkait. Selain tugas-tugas tersebut, kantor dinas kesehatan ini juga bertanggung jawab atas penyuluhan kesehatan, kesehatan jiwa, dan olahraga bagi masyarakat dan keluarga. Selain itu, lembaga kesehatan ini bertanggung jawab untuk menjamin dan mengawasi berbagai fasilitas kesehatan yang termasuk rumah sakit, alat kesehatan, obat-obatan, dokter, klinik, apotek, dan sebagainya.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya usaha

kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan dalam melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai Pada Pasal 6 Ayat 1 yang berisi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Kesehatan sejauh ini sudah melaksanakan program rembuk Stunting di 8 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Tanjung balai bekerjasama dengan para Camat, lurah, kepling serta para kader dan menyerahkan bantuan vitamin berupa susu. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Sahkal selaku Satgas Stunting Pemko Tanjungbalai mengatakan Kecamatan Teluk Nibung tahun 2022 merupakan Kecamatan yang beresiko stunting yakni dengan jumlah 1396 kasus, sementara Kecamatan yang paling rendah beresiko stunting adalah kecamatan Tanjung Balai Selatan yaitu sebesar 274.

Kecamatan Teluk Nibung merupakan salah satu dari enam kecamatan yang ada di Kota Tanjungbalai, dengan luas 12,55 Km² yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu kelurahan beting kuala kapias, kelurahan kapias pulau buaya kelurahan sei merbau, kelurahan pematang pasir dan kelurahan perjuangan. Ibu

kota kecamatan terletak di Kelurahan Pematang Pasir. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kecamatan Teluk Nibung menurut data dari Profil Kependudukan Kota Tanjungbalai (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah sebanyak 42.077 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kelurahan Beting Kuala Kapias yaitu sebanyak 9.518 jiwa dan yang paling sedikit ada di Kelurahan Sei Merbau sebanyak 7.203 jiwa.

Maka berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan yaitu, Bagaimana Peran Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Stunting di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan Stunting di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini adalah:

- a) Manfaat secara teoritis yang diberikan oleh penelitian ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah.
- b) Manfaat secara praktis yang diberikan oleh peneliti ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, aka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatau bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hubungan anatar administrasi publik dengan pelayanan publik, pengertian administrasi publik, pelayanan, pelayanan publik, peran partisipatif dinas kesehatan, pengertian stunting, penyebab stunting dan dampak stunting.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan/narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang pembahasan dan hasil penelitian dari Peran Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Teluk Nibung.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Hubungan Antara Administrasi Publik Dengan Pelayanan Publik

Menurut Ghoni dkk., (2020) Dalam ilmu administrasi publik, pelayanan merupakan topik utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Paradigma New Public Management (NPM) menghasilkan teori-teori tentang pelayanan, termasuk konsep manajemen pelayanan publik untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan kata lain, mengikutsertakan pihak lain oleh pemerintah agar dapat memaksimalkan pelayanan publik, yaitu salah satunya pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah, adalah salah satu paradigma dalam ilmu administrasi publik.

Administrasi dan pelayanan publik merupakan ruh dari penyelenggaraan negara yang berbasiskan pada good cooperate government. Jika hal ini terselenggara dengan baik, maka yang ikut merasakan dampak positif dari pelayanan publik adalah warga negara Indonesia yang berketuhanan yang maha esa (umat beragama).

Hubungan antara pelayanan public dan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia sangat berhubungan, dimana penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur Negara serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas Negara Republik Indonesia. Dan pelayanan public merupakan salah satu sistem administrasi Negara Indonesia , dan merupakan hal sangat berkaitan dan dimana administrasi disini mempunyai arti

melayani , dan sistem administrasi Negara berarti pelayanan mengenai terselenggaranya suatu kenegaraan, maka dalam hal ini banyak sekali masalah-masalah mengenai sistem administrasi Negara , terutama dalam hal pelayanan publik.

2.2 Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik ialah ilmu sosial yang mengkaji sistem ketatanegaraan suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan publik yang mencakup organisasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, dan pelayanan publik. Administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Chandler & Plano dalam Pasolong (2020), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Dwight Waldo dikutip Syafei (2003) Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Sependapat dengan pernyataan diatas yang dikemukakan oleh George J.Gordon yang dikutip Syafei (2003) bahwa administrasi negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

2.3 Pelayanan

2.3.1 Pengertian Pelayanan

Pelayanan berasal dari kata "layanan", yang berarti membantu menyiapkan kebutuhan seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pelayanan adalah suatu-usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan oleh orang lain. Kata "service" berasal dari kata "melayani". Salah satu definisi lain dari istilah "pelayanan" adalah suatu bentuk tindakan atau keuntungan yang diberikan oleh elemen organisasi atau individu kepada seluruh unsur konsumen (yang dilayani). Dalam hal ini, pelayanan lebih bersifat abstrak atau tidak dapat dimiliki. Oleh karena itu, pelayanan dapat didefinisikan sebagai kumpulan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat, baik yang dapat diraba maupun yang tidak

Gronross dalam Mukrimaa dkk., (2016) mendefinisikan pelayanan sebagai "suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang dapat terjadi sebagai akibat dari adanya suatu interaksi antara unsur konsumen yang membutuhkan pelayanan dengan unsur karyawan yang memberikan pelayanan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan oleh pemberi pelayanan dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan konsumen."

Definisi yang lebih sederhana dan lebih bersifat umum tentang konsep dari pelayanan juga diberikan oleh Ivancevich dalam Mukrimaa dkk., (2016), yang menyatakan tentang pelayanan bahwa; "pelayanan adalah

merupakan produk-produk yang tidak bersifat kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan adanya usaha-usaha dari unsur manusia yang menggunakan peralatan dalam memenuhi berbagai bentuk kebutuhannya dalam kehidupan”.

Dalam KEPMENPAN 81/93, pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Setijaningrum, 2017)

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah bentuk kegiatan yang diberikan oleh organisasi atau individu yang terjadi karena adanya interaksi antara pemberi layanan dengan penerima layanan.

2.3.2 Pengertian Pelayanan Publik

Pengertian dari pelayanan publik terdapat di dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Kepmenpan ini memberikan pengertian terhadap pelayanan publik, pelayanan publik yaitu; segala bentuk dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya dalam proses pemenuhan dari segala bentuk kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik menurut Monang (2013) adalah dasar yang diberikan pemerintah kepada publiknya, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat diberikan pemerintah kepada pihak swasta, atau pemerintah dan swasta dapat bermitra untuk mengoptimalkan pelayanan tersebut.

Menurut Dirdjosanjoto dalam (Malawat, 2022), pelayanan publik adalah hak dari seluruh warga negara dan tanggung jawab negara untuk menyediakannya. Namun, negara belum bisa menyediakan penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara kuantitas dan kualitas.

Dari defenisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan pemberian layanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah kepada penerima layanan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aturan pokok dan tata caranya.

2.4 Partisipatif

2.4.1 Pengertian Partisipatif

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “participation” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan dalam kegiatan suatu organisasi. Partisipasi pemangku kepentingan dalam (Ariyani, 2021) dapat dideskripsikan sebagai proses dimana seluruh aktor pemangku kepentingan dari suatu sistem dapat terlibat dan membentuk inisiatif pada proses pengembangan suatu sistem.

Dua kata yang dekat dengan partisipasi adalah keterikatan (engagement) dan keterlibatan (involvement) yang mencerminkan intensitas dari partisipasi. Agar partisipasi pemangku kepentingan dapat terwujud maka antusiasme terhadap pola kerja kemitraan, keterikatan dan keterlibatan harus dipupuk dengan sungguh-sungguh.

Menurut Salusu “Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu”. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. (Saliu, A., Ismawati, A., fiqih, A., 2024)

Davis dan Newstrom dalam (Artha Ayu Purnama, 2021) partisipasi berkaitan dengan keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu. Ada tiga gagasan penting dari definisi Davis dan Newstrom tersebut, yaitu: pertama, keterlibatan, partisipasi berarti adanya keterlibatan mental dan emosional daripada hanya berupa aktivitas fisik. Keterlibatan ini bersifat psikologis sehingga seseorang yang berpartisipasi terlibat emosinya dan bukan hanya terlibat karena tugasnya. Kedua, kontribusi dalam partisipasi yang sangat penting adalah motivasi orang-orang untuk memberikan kontribusi mereka diberi kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreatifitasnya guna mencapai tujuan bersama organisasi. Ketiga, tanggung jawab, bahwa partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Disini terjadi proses

sosial orang-orang menjadi terlibat sendiri dalam organisasi dan pada akhirnya mereka bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaannya.

2.4.2 Jenis Partisipatif

Menurut Hamijoyo (2007) dalam (Sulistiyorini dkk., 2015) jenis partisipasi terbagi sebagai berikut:

- 1) Partisipasi pemikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program, maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- 2) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- 3) Partisipasi ketrampilan adalah memberikan dorongan melalui ketrampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- 4) Partisipasi barang adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang barang atau harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja.
- 5) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan

Menurut Sundariningrum dalam Ferdinand, (2010) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

1) Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2) Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

2.5 Stunting

2.5.1 Pengertian Stunting

Secara etimologis, stunting dari kata stunt (noun) yang berarti kerdil atau pendek yang merupakan suatu keadaan yang tidak berkembang atau pendek dari rata-rata anak di usianya. Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (growth faltering) akibat defisiensi nutrient kronis yang berlangsung selama lama sejak anak dalam kandungan hingga berusia 24 bulan.

Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah

standar. Balita Pendek (Stunting) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/ stunted) dan <-3 SD (sangat pendek / severely stunted). Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang dikaitkan dengan meningkatnya risiko sakit, kematian, dan kesulitan pertumbuhan motorik dan mental. Jika pemenuhan kebutuhan selanjutnya tidak dipenuhi dengan baik, kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami stunting. Ini disebabkan oleh penurunan pertumbuhan dan pertumbuhan yang tidak memadai, yang merupakan tanda ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan ideal (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2017; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). (Rahmadhita, 2020)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa stunting adalah gangguan gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi seimbang yang terjadi sejak bayi dalam kandungan dan dapat diketahui ketika anak berusia 24 bulan dimana keadaannya pendek tidak berkembang seperti anak-anak seusianya.

2.5.2 Penyebab Stunting

Salah satu penyebab stunting dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya desinfeksi alami, perawatan makanan, dan data ibu tentang pengendalian diri. Dari faktor bantuan pemerintah yang biasa ini, ada hubungan antara sumber air bersih yang dilindungi dan yang tidak dilindungi, air merupakan senyawa dasar untuk penyumbatan tubuh, sehingga tidak dapat digantikan oleh berbagai kombinasi. Sumber air yang tidak terlindung meningkatkan risiko stunting.

- a) Menurut Kemenkes dalam Choliq dkk., (2020) Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Secara lebih detil, beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut:
- b) Praktek pengasuhan yang kurang baik.
- c) Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas).
- d) Masih kurangnya akses rumah tangga/ keluarga ke makanan bergizi.
- e) Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

2.5.3 Dampak Stunting

Penurunan kecerdasan dan penurunan kognitif sebagai dampak anak mengalami stunting. Malnutrisi dan stunting berdampak pada motorik dan mental lemah pada usia masa kanak-kanak, serta kinerja kognitif dan prestasi akademik yang buruk di masa kecil. Malnutrisi anak dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat (SSP).

Perkembangan fisik anak yaitu stunting juga berdampak pada kondisi otak serta pertumbuhannya karena dengan terjadinya malnutrisi serta stunting maka system persarafan juga kurang nutrisi dan akhirnya produksi sel-sel otak juga tidak bias maksimal sehingga daya pikir dan kecerdasan terganggu sebagai akibat sel-sel otak tidak bias berkembang secara maksimal. (Anwar dkk., 2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

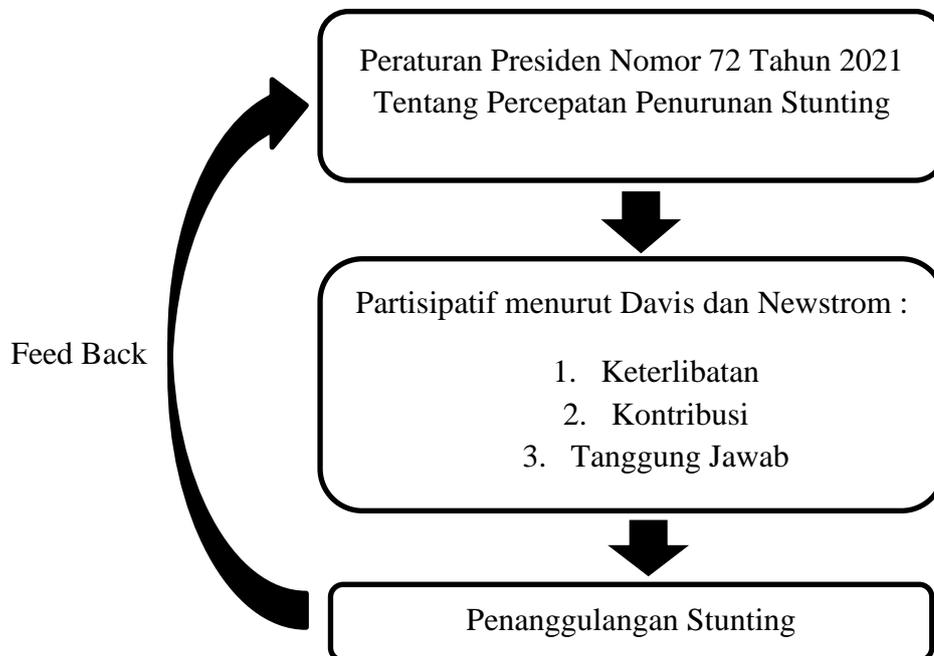
Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif. Data deskriptif sendiri diperoleh dalam bentuk kata-kata dan gambar daripada angka seperti dalam penelitian kuantitatif. (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021)

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Tidak lain dengan cara mendeskripsikan beberapa jumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menafsirkan serta menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap dan pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dibuat untuk meningkatkan arah peneliti dan mempermudah penyusunan skripsi dan penilaian. Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian



3.3 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang digunakan untuk penelitian yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang dapat terjadi sebagai akibat dari adanya suatu interaksi antara unsur konsumen yang membutuhkan pelayanan dengan unsur karyawan yang memberikan pelayanan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan oleh pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan dari konsumen/ pelanggan.
2. Pelayanan publik yaitu; segala bentuk dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya

dalam proses pemenuhan dari segala bentuk kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipasi merupakan desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan.
4. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Adanya Pelayanan
- 2) Adanya Koordinasi
- 3) Adanya Tanggung Jawab
- 4) Adanya Keterlibatan/ Kontribusi

3.5 Informan/Narasumber

Informan/narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang

berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian.

Untuk mendapatkan dan melengkapi data, maka peneliti menggunakan narasumber atau keyinforman untuk melengkapi data yang sudah ada. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Informan 1

Nama : Dwi Rahmi Zaki, SKM, MPH

Usia : 43 Tahun

Jabatan : Kabid Kesehatan Masyarakat

2. Informan 2

Nama : Rismawati, SST, M.K.M

Usia : 48 Tahun

Jabatan : Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi

3. Informan 3

Nama : Helda

Usia : 31 Tahun

Jabatan : Masyarakat Teluk Nibung

Alamat : Jln. Pematang Pasir

4. Informan 4

Nama : Rahmi Sentasi Tanjung

Usia : 43 Tahun

Jabatan : Masyarakat Teluk Nibung

Alamat : Jln. Jenaha

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang baik, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

1. Data primer

Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan.

Data primer adalah pengumpulan data yang digunakan untuk diperoleh secara langsung di lapangan atau tempat penelitian. Dalam hal ini data diperoleh dengan metode-metode yaitu:

a) Observasi

Observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan hal-hal lainnya yang dapat langsung diamati oleh peneliti. Jadi, dalam observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian. Oleh karena, dilakukan pengamatan langsung, maka teknik ini digunakan bila responden yang diamati tidak terlalu besar jumlahnya.

b) Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.

c) Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder menurut Syafnidawaty, (2020) adalah data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Pengumpulan data sekunder biasanya lebih mudah dan lebih cepat daripada pengumpulan data langsung dari sumbernya. Sumber-sumber seperti publikasi pemerintah, situs web, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi, dan lainnya dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai jenis data sekunder. Data sekunder cenderung lebih praktis, murah, dan cepat didapatkan karena dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan akses mudah, tidak spesifik, dan tidak memiliki kontrol terhadap data karena peneliti merupakan tangan kedua, dan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya relatif tidak besar, cepat, dan mudah. Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu dengan cara melakukan pendekatan kualitatif, untuk menuntaskan masalah-masalah agar dapat dipahami dan dimengerti secara keseluruhan dari penelitian ini, agar dapat diperoleh

gambaran yang jelas. Data yang diolah menggunakan analisis secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan mengenai Peran Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Stunting di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

Noeng Muhadjir dalam (Rijali, 2018) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”

Menurut Miles, Huberman and Saldana dalam (Abdussamad, 2021) teknik analisis data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi data (Data reduction): artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola. Dengan cara ini, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya, dan mencari data lebih banyak jika diperlukan.
- b. Pengumpulan data (Data collection): Data yang terkumpul kemudian disusun dalam bentuk narasi sehingga membentuk sekumpulan informasi yang bertujuan sesuai dengan masalah penelitian.

- c. Penyajian data (Data Display): Melakukan interpretasi data, yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan narasumber sehubungan dengan masalah yang diteliti.
- d. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/verification): Penarikan kesimpulan berdasarkan struktur narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai. Jalan Gereja No. 2 B, Kode Pos 21311 Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Dengan rentang waktu penelitian dimulai dari bulan Maret sampai bulan Mei 2024.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum

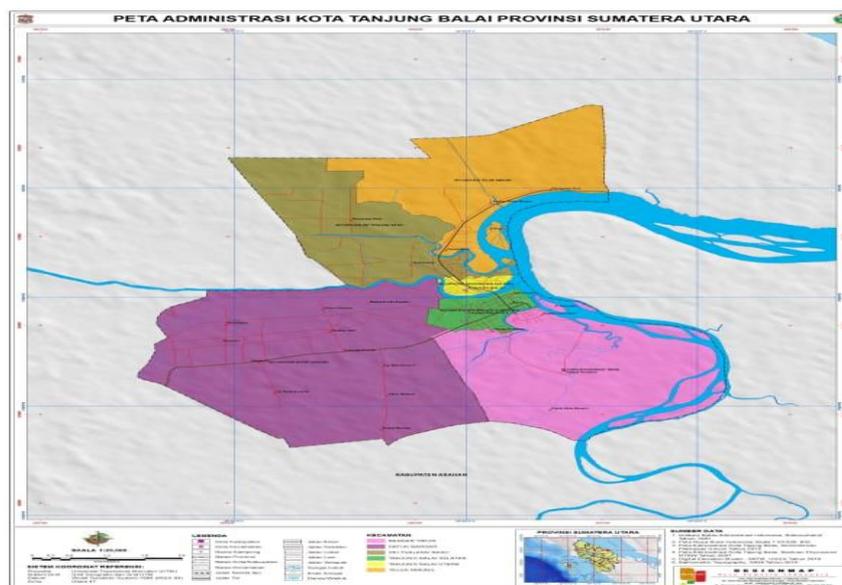
Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai merupakan instansi yang bertanggung jawab mengenai kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan. Kota Tanjung Balai memiliki 6 kecamatan yaitu: Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai Selatan, Tanjungbalai Utara, Sei Tualang Raso, dan Teluk Nibung.

Kecamatan Teluk Nibung merupakan salah satu dari enam kecamatan yang ada di Kota Tanjungbalai, dengan luas 12,55 Km² yang

terdiri dari 5 (lima) kelurahan. Ibu kota kecamatan terletak di Kelurahan Pematang Pasir. Wilayah Kecamatan Teluk Nibung sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Tualang Raso, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.

Gambar 3.2

Peta Kota Tanjung Balai



Sumber: <https://images.app.goo.gl/cvXJMhY6twSr5xyT6>

3.9.2 Visi Misi dan Motto Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai

Visi dari Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai adalah mewujudkan masyarakat sehat dengan kualitas hidup yang tinggi, mandiri berlandaskan gotong royong.

Misi Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai ialah:

1. Meningkatkan peran Promotif dan preventif dengan memberdayakan potensi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan rujukan.

Motto Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai adalah peduli, ramah, ikhlas, mandiri dan adil.

3.9.3 Maklumat Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, pimpinan dan jajaran Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai berjanji dan sanggup untuk:

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan yang ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbikan secara terus-menerus.
3. Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami tidak sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.9.4 Tupoksi KADIS, Kabid Kesmas, Kasi Kesga & Gizi

3.9.4.1 Kepala Dinas Kesehatan

- 1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota Tanjungbalai. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan;
 - b. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;

- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota sesuai standar yang ditetapkan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh :
- a. Sekretaris;
 - b. kepala bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. kepala bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - e. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - f. kelompok jabatan fungsional.

3.9.4.2 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

- 1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,

- pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dibantu oleh :
- a. Kepala seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

- b. Kepala seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Kepala seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

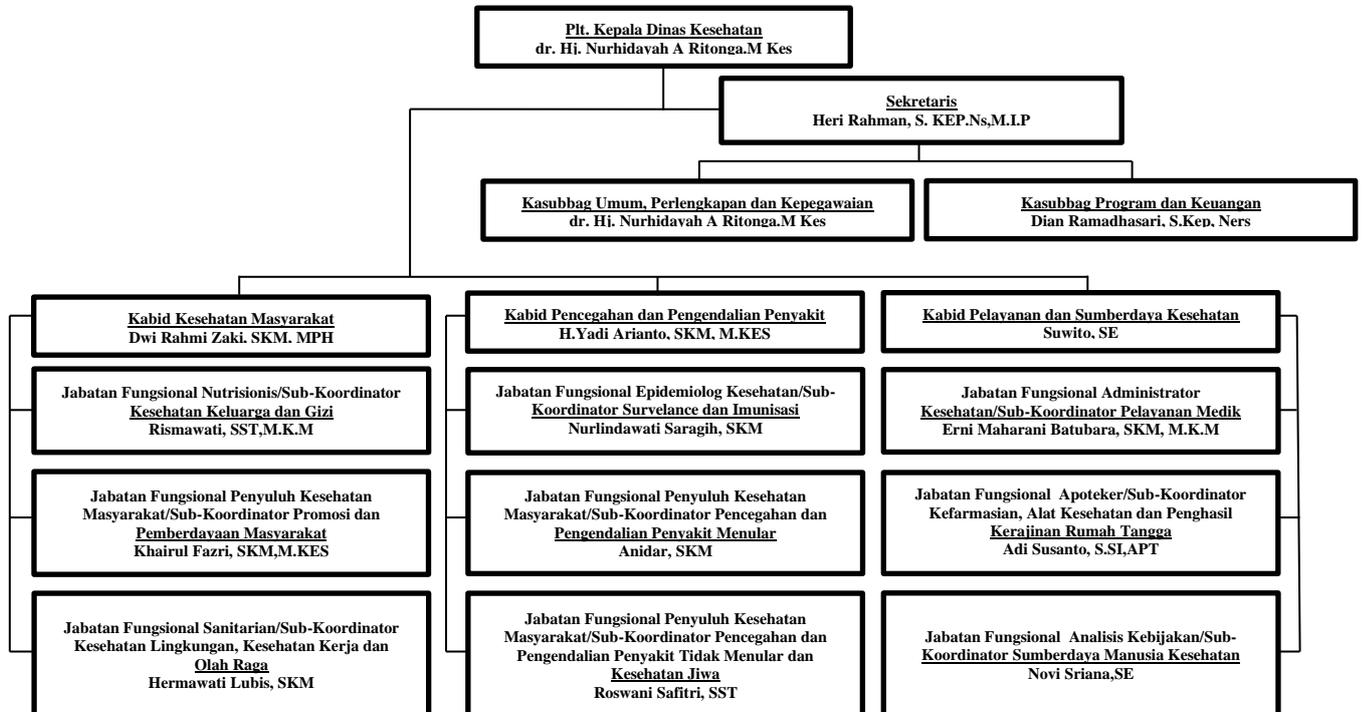
3.9.4.3 Tugas Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

- a. Menyusun kegiatan operasional program kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, lansia dan keluarga berencana meliputi segi pelayanan medis dan teknis;
- b. Melaksanakan pembinaan kepada petugas kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, upaya kesehatan sekolah, gizi, lansia di Puskesmas serta bidan kelurahan dan dukun bayi.
- c. Melaksanakan pemantauan tumbuh kembang bayi, balita termasuk pelacakan kasus gizi dan kejadian luar biasa;
- d. Melaksanakan Audit Maternal dan perinatal;
- e. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan kesehatan usia lanjut secara perorangan dan kelompok;
- f. Melaksanakan program perbaikan gizi masyarakat, identifikasi permasalahan gizi dan pemecahan masalah gizi serta upaya perbaikan gizi masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi anak usia sekolah dasar, menengah dan atas (Usaha Kesehatan Sekolah dan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja);
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai bidang tugasnya;

- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai standar yang ditetapkan.

3.9.5 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai

Gambar 3.3 Peta Jabatan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini peneliti akan menganalisis hasil dari penyajian data dengan tetap mengacu kepada hasil data sesuai dengan fokus yang ada dalam penelitian. Analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data yang telah disediakan baik melalui wawancara, serta observasi yang berkaitan dengan Peran Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Teluk Nibung.

Berikut data stunting yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1

Data Balita Stunting Kota Tanjung Balai

NO	PUSKESMAS	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		PEDEK (STUNTED)	SANGAT PEDEK (STUNTING)	PEDEK (STUNTED)	SANGAT PEDEK (STUNTING)	PEDEK (STUNTED)	SANGAT PEDEK (STUNTING)
1	DATUK BANDAR	0	0	0	0	3	5
2	SEMULA JADI	6	6	0	0	17	7
3	MUD	1	0	0	0	10	5
4	KAMPUNG BARU	19	9	1	2	3	3
5	KAMPUNG PERSATUAN	26	16	0	1	15	8
6	ST. RASO	17	3	0	0	8	0
7	TELUK NIBUNG	4	0	0	0	9	0
8	RI. SIPORI PORI	4	1	0	0	0	0
TOTAL		77	35	1	3	65	28

DIKETEHI
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANJUNGBALAI

dr. H. Daryati, S.Sy, M.Pd, M.Kes
NIP. 19700225-200912 2 001
KESKI

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai

Dilihat pada gambar di atas, data yang di dapat tidak sesuai dengan kondisi Stunting berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis

Masyarakat (EPPGBM) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada bulan Oktober 2023 di Kota Tanjung Balai yang mana dari 8.053 jumlah anak yang diukur dengan hasil 7.949 anak normal, 12 anak kategori tinggi dan 92 anak yang terkena stunting (Trinugroho., 2024). Sedangkan pada gambar di atas kondisi stunting tahun 2023 hanya 3. Dan berdasarkan observasi saya menunjukkan bahwa masih adanya anak stunting di Kecamatan Teluk Nibung pada tahun 2024, hal ini merupakan kurang *update* nya data dari Dinas Kesehatan.

4.1.1 Adanya Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 23 April 2024 dengan Ibu Dwi Rahmi Zaki, SKM, MPH selaku Kabid Kesehatan Masyarakat, Beliau mengatakan bahwa:

“Pelayanan yang diberikan terhadap penanggulangan stunting sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu intervensi sensitif dan intervensi spesifik, jadi kedua intervensi itu sudah teretra di Kementerian Kesehatan untuk seluruh Dinas Kesehatan se-Indonesia. Intervensi sensitif itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan. Intervensi sensitif terbagi menjadi 4 jenis yaitu penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan bergizi. Sedangkan untuk intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Sebenarnya program stunting bukan hanya tugas dari Dinas Kesehatan melainkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain juga terkait karena berasal dari perilaku, sanitasi air bersih, pendidikan faktor pengetahuan juga berperan dalam pola asuh ibu terhadap bayinya”.

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilakukan di hari Kamis 25 April 2024 dengan Ibu Rismawati, SST, M.KM selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi, Beliau mengatakan bahwa:

“Pelayanan/ pencegahan yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai dalam penanggulangan stunting berdasarkan program yang ada seperti pemeriksaan ibu hamil ANC nya harus 6x selama hamil, nutrisi makanannya harus gizi seimbang, bayi harus di posyandu dengan pemberian vitamin A, pada remaja putri pemberian tablet penambah darah 1 butir selama seminggu untuk mencegah anemia, pada calon pengantin dibekali dengan pengetahuan agar nanti memasuki masa pra-nikah anak yang dilahirkan tidak stunting”.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan masyarakat yaitu Ibu Helda pada hari Rabu 15 Mei 2024, Beliau mengatakan bahwa:

“Pelayanan yang anak saya dapatkan dari Puskesmas yaitu pemberian berupa susu dengan pemantauan rutin melakukan pengukuran tinggi badan anak saya dan penimbangan berat badannya dan alhamdulillah dari pemantauan pihak puskesmas maupun posyandu badan anak saya ada peningkatan dulunya ini lebih kurus”.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Rahmi Sentasi Tanjung selaku masyarakat yang dilakukan pada hari Rabu 15 Mei 2024, Beliau mengatakan bahwa:

“Pelayanan yang di dapat anak saya dari Pemerintah yaitu program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa susu yang diberikan oleh Puskesmas Teluk Nibung untuk memperbaiki gizinya”.

4.1.2 Adanya Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 23 April 2024 dengan Ibu Dwi Rahmi Zaki, SKM, MPH selaku Kabid Kesehatan Masyarakat, Beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan/ Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan Walikota dan Lintas Sektor untuk percepatan penurunan

stunting karena ini bukan tugas Dinas Kesehatan saja melainkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain juga. Secara umum tidak ada kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi karena sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing”.

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilakukan di hari Kamis 25 April 2024 dengan Ibu Rismawati, SST, M.KM selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi, Beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan atau Koordinasi Dinas Kesehatan bersama dengan BKKBN untuk penanggulangan stunting, mungkin data dari sini intervensinya apa yang harus dikerjakan orang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) konsultasi dengan Dinas Kesehatan misalnya penentu status gizinya, BKKBN bersama-sama dengan Puskesmas tapi terkait disitu dari Dinas Kesehatan 1 ahli gizinya, misal ditemui kasus stunting apa yang harus diberikan dan apa yang harus dilakukan”.

4.1.3 Adanya Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 23 April 2024 dengan Ibu Dwi Rahmi Zaki, SKM, MPH selaku Kabid Kesehatan Masyarakat, Beliau mengatakan bahwa:

“Tanggung jawab Dinas Kesehatan melakukan penanggulangan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden no 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting”.

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilakukan di hari Kamis 25 April 2024 dengan Ibu Rismawati, SST, M.KM selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi, Beliau mengatakan bahwa:

“Bentuk tanggung jawab atau upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dengan penyuluhan, pemeriksaan. Contohnya dimulai dari masa bayi pemeriksaannya itu dipantau tumbuh kembang bayinya. Pada masa remaja putri diberi tablet penambah darah salah satu upaya untuk mencegah stunting. Dinas Kesehatan sebagai manajemen menyampaikan program ke petugas Kesehatan yaitu Puskesmas, apa yang perlu dilakukan. Puskesmaslah yang langsung ke masyarakat”.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan masyarakat yaitu Ibu Helda pada hari Rabu 15 Mei 2024, Beliau mengatakan bahwa:

“Bentuk tanggung jawab saya kepada anak saya dengan pemantauan tumbuh kembangnya dengan memberikan gizi yang cukup sesuai anjuran pihak puskesmas”.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Rahmi Sentasi Tanjung selaku masyarakat yang dilakukan pada hari Rabu 15 Mei 2024, Beliau mengatakan bahwa:

“Tanggung jawab yang saya lakukan rutin memberikan susu yang diberikan oleh Puskesmas kan katanya susu efektif untuk mendorong penambahan berat badan pada anak, juga melakukan perilaku hidup bersih dan sehat”.

4.1.4 Adanya Keterlibatan/ Kontribusi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 23 April 2024 dengan Ibu Dwi Rahmi Zaki, SKM, MPH selaku Kabid Kesehatan Masyarakat, Beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu bentuk kontribusi atau keterlibatan Dinas Kesehatan adalah melakukan penjarangan kasus, pencegahan dan pemulihan stunting dengan intervensi sensitif dan intervensi spesifik dan adanya pihak yang terlibat andil untuk mempercepat penurunan stunting”.

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilakukan di hari Kamis 25 April 2024 dengan Ibu Rismawati, SST, M.KM selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi, Beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu bentuk kontribusi dan partisipasi Dinas Kesehatan yaitu dalam Program PKH dari Dinas Sosial yang sarannya ibu-ibu yang memiliki balita jadi pada saat ada pertemuan dengan Keluarga Harapan tadi mereka juga ambil andil untuk mempercepat penurunan stunting, karena mereka bukan dari kesehatan maka mereka memintalah ke Dinas Kesehatan atau Dinas Kesehatan memerintah

orang Puskesmas untuk mendampingi program PKH tersebut sebagai narasumber”.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Helda selaku masyarakat yang dilakukan pada hari Rabu 15 Mei 2024, Beliau mengatakan bahwa:

“Ibu Helda mengatakan bahwa bentuk keterlibatannya dengan rajin memberikan susu yang diberi oleh puskesmas dan datang ke posyandu namun kadang saya lupa jadwal atau tanggalnya”.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Rahmi Sentasi Tanjung selaku masyarakat yang dilakukan pada hari Rabu 15 Mei 2024, Beliau mengatakan bahwa:

Ibu Rahmi Sentasi Tanjung mengatakan bahwa bentuk kontribusinya dengan rutin datang ke posyandu karena melalui posyandu saya bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak saya. Pihak Puskesmas juga menyarankan untuk rutin datang ke posyandu guna untuk memperbaiki gizi anak saya”.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Adanya Pelayanan

Pelayanan publik menurut Moenir dalam (Kamu dkk., 2020) adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pemberian pelayanan publik oleh aperatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat.

Pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good

governance). Pemberian pelayanan kepada masyarakat juga hasil kerja yang nyata dalam pemerintahan khususnya pemerintahan desa. Dengan demikian, dibutuhkan tata kelola yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas. (Ali, K., Agung, 2020)

Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat, lingkungan. (Kholik dkk., 2022)

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas untuk Kecamatan Teluk Nibung sudah berjalan dengan baik dan dalam pelayanannya sesuai dengan yang dinyatakan para narasumber bahwa tidak ada kendala yang terjadi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat juga turut senang dengan adanya program pemerintah karena anaknya mengalami perkembangan.

4.2.2 Adanya Koordinasi

Koontz dan O'Donell dalam (Febrian & Yusran, 2021) yang menyatakan bahwa koordinasi ialah upaya yang dilakukan untuk memadukan proses pada beberapa satuan unit kegiatan pada organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Koordinasi dapat diartikan sebagai upaya kerjasama antar lembaga, lembaga, satuan dalam pelaksanaan tugas tertentu sedemikian rupa sehingga

ada yang saling melengkapi, selalu membantu. Koordinasi juga dapat digambarkan sebagai suatu pengaturan yang teratur dari upaya- upaya kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. (Saputra, A., dkk, 2023)

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan Dinas Kesehatan dengan Walikota, maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BKKBN dan Puskesmas sudah berjalan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dalam melakukan koordinasi tidak ada kendala.

4.2.3. Adanya Tanggung Jawab

Mudjiono dalam (Siregar & Erlindawaty, 2020) menyatakan bahwa, tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tanggung jawab yang dijalankan sudah berjalan baik namun diharapkan kepada masyarakat harus betul-betul melakukan pemantauan kepada anaknya dan mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pola makan sehat serta mendukung program-program pemerintah karena stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan tapi tanggung jawab semua elemen masyarakat.

4.2.4. Adanya Keterlibatan/ Kontribusi

Kontribusi adalah pemberian andil sesuatu kegiatan peranan, masukan ide dan lain sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto Kontribusi juga biasa dikenal dengan peranan, sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern peran adalah sebagian perangkat harapan-harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Menurut Soerjono dan Djoenaesih , kontribusi adalah ikut serta ataupun memberikan baik itu ide, tenaga dan lain sebagainya dalam kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan. (Novera dkk., 2023)

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui bahwa kontribusi merupakan keterlibatan seseorang secara langsung. Dan dari wawancara yang dilakukan bahwa kontribusi dari semua pihak berjalan baik secara harmonisasi namun masyarakat harus lebih aktif mendukung kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dilakukan dengan baik namun terjadi kendala di data yang di dapatkan menunjukkan kurang *update* nya Dinas Kesehatan terhadap data yang di berikan karena berbeda dengan keterangan di masyarakat.

- a. Adanya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dilihat dari pemantauan dan observasi Dinas Kesehatan sudah melakukan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu pelayanan berupa pemberian susu kepada anak stunting dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) .
- b. Adanya koordinasi yang sudah berjalan dengan baik dan harmonisasi, yang dilakukan supaya semua orang dapat berkerja mencapai tujuan bersama dengan dilaksanakannya rapat lintas sektor bersama pihak-pihak yang terkait dalam program penanganan stunting.
- c. Adanya tanggung jawab yang merupakan tanggung jawab semua, pemerintah maupun masyarakat, karena stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan tapi tanggung jawab semua elemen masyarakat, maka masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan meningkatkan

kesadaran akan pentingnya gizi yang seimbang, dan mendukung program-program pemerintah terkait nutrisi.

- d. Adanya kontribusi atau partisipasi dalam penanggulangan stunting dari berbagai pihak yang sudah berjalan dengan baik secara harmonisasi namun masyarakat harus lebih aktif mendukung kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan rutin datang ke Posyandu terdekat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai disarankan agar meningkatkan kualitas kerja dengan perhatian pada data anak stunting agar lebih update dalam penginputan data di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai.
- b. Disarankan kepada masyarakat Kecamatan Teluk Nibung agar pada saat remaja mengonsumsi tablet tambah darah, wanita hamil harus melakukan ANC 6 kali selama hamil. Saat bayi berusia 6 bulan, memberikan ASI saja tidak cukup pada saat itu bayi perlu makanan pendamping ASI guna memenuhi kebutuhan zat gizi, memperhatikan gizi anak sejak 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari janin hingga berusia 2 tahun dengan mengonsumsi protein hewani seperti daging, ikan, telur, dan ayam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Ali, K., Agung, S. (2020). *Tata Kelola Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar*. 14, 564–584.
- Anwar, S., Winarti, E., & Sunardi, S. (2022). SYSTEMATIC REVIEW FAKTOR RISIKO, PENYEBAB DAN DAMPAK STUNTING PADA ANAK. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(1). <https://doi.org/10.32831/jik.v11i1.445>
- Ariyani, N. (2021). Analisa Partisipasi Pemangku Kepentingan pada Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 4(2), 147. <https://doi.org/10.22146/jpt.60678>
- Artha Ayu Purnama, A. O. D. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Bahari Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 3(2), 113–126. <https://doi.org/10.24036/csjar.v3i2.84>
- Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai. (2023). *Kecamatan Teluk Nibung Dalam Angka 2023*.
- Choliq, I., Nasrullah, D., & Mundakir, M. (2020). Pencegahan Stunting di Medokan Semampir Surabaya Melalui Modifikasi Makanan Pada Anak. *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.30651/hm.v1i1.4544>
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 11–21. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214>
- Ferdinand, B. T. (2010). *Partisipasi Warga Sekolah Dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Di Sd Negeri Kejayaan (2012)*. 201–202.

- Ghoni, K. A. A.-D., Wike, W., & Novita, A. A. (2020). Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 006(01).
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.9>
- Kamu, S. N., Pati, A., & Sampe, S. (2020). Analisis Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(91), 55–71.
- Kholik, K., Sari, M. T., Hajar, S., Saputra, A., Juliani, I., Dimensi, S., Pelayanan, K., Berbasis, K., Mutu, M., Puskesmas, D., Medan, K., & Saragih, I. J. (2022). Dimensi Kualitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Manajemen Mutu di Puskesmas Kota Medan. *Jurnal Sinar Manajemen*, 9(3), 496–506.
- Malawat, S. (2022). Buku Pengantar Administrasi Publik. In *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/buku pengantar administrasi publik.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/buku%20pengantar%20administrasi%20publik.pdf)
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د غسان., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). PELAYANAN PUBLIK ; Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6.
- Novera, S. T., Ayesfi, I., Virqiyah, S., Rustinar, E., & Sakroni. (2023). Kontribusi Sosial Mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SDN 03 Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(2), 797–808.
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1). <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. 17(33), 81–95.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif

- Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Saliu, A., Ismawati, A., fiqih, A., L. F. (2024). *Upaya Meningkatkan Minat Remaja dalam Mengikuti Kegiatan Dewan Kemakmuran Masjid Melalui Model Belajar Interaktif*. 2, 82–88.
- Saputra, Agung., Jehan R, i., Ananda, Mahardika., Sigit Hardiyanto., Tiara, S. (2023). *BAPPEDA Coordination Function in Deveploment Planning in Deli Serdang District*. 3(1), 10–12. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-07-7>
- Setijaningrum, E. (2017). Inovasi Pelayanan Publik. In *PT MEDIKA AKSARA GLOBALINDO* (Vol. 4, Issue 1).
- Siregar, F. S., & Erlindawaty. (2020). Penguatan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Sumatera Utara Pada Anak Panti Asuhan Al Munawwaroh. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 26–31. <https://doi.org/10.30596/jp.v5i1.5743>
- Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Social Worker Journal*, 5(1), 71–80. <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13120/0>
- Syafnidawaty. (2020). Perbedaan Data Primer Dan Data Sekunder. *Raharja.Ac.Id.*
- Trinugroho., A. (2024). *Laporan Tpps Semester Ii Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara*. 30.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Foto dengan Ibu Dwi Rahmi Zaki, SKM, MPH selaku Kabid Kesehatan Masyarakat.



Gambar 2. Foto dengan Ibu Rismawati, SST, M.K.M, selaku Sub-Kordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi



Gambar 3. Foto dengan Ibu Helda dan Hafizhul Furqan, selaku masyarakat Teluk Nibung yang terkena stunting,



Gambar 4. Foto dengan Ibu Rahmi Sentasi Tanjung dan Muhammad Ummar MRP, selaku masyarakat Teluk Nibung Yang terkena stunting.

SK-1 PERMOHONAN PERSETERUAN JUDUL



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila ma'rifat surut in agar dicituhkan
konor dan langganyu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.K/P/PT/1/2022
Pusat Administrasi: Jalan Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisp.umh.ac.id fisp@umh.ac.id umsumedan umjumedan umcumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 30 Januari 2024.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Nelys
NPM : 201100942
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : 33, SKS, IP Kumulatif 3,164

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Peretujuan
1	Pelafatan Peran Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan Stunting di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai	30/1/2024 AS
2	Fungsi direktori dinas perikanan terhadap pebanan masyarakat di kab Tanjungbalai	
3	Identifikasi sengketa lahan gedung olahraga (GOR) di kab Tanjungbalai	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 30 Januari 2024.

Ketua

Program Studi.....

(.....)
NIDN: 020118101

Pemohon,

(..... Nelys)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi..... I.....

(.....)
NIDN: 0130056601

(40) PR: SYAFRUDDIN S.Sos



SK-2 SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PTXU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING Nomor : 215/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 30 Januari 2024, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : NEYS
 N P M : 2003100042
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **PERAN PELAYANAN PARTISIPATIF DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNG BALAI**
 Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 040.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 30 Januari 2025.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 19 Rajab 1445 H
 31 Januari 2024 M


 Dekan,
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN/0050017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peninggal.



SK-3 PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/KU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fkip.umsu.ac.id> fkip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 6 Maret 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Neys
 N P M : 2005100092
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 215.../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 30 Januari 2024 dengan judul sebagai berikut :

Peran Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Stunting di Kecamatan Teluk Melayu Kota Tanjung Balai

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Foto copy Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Foto copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui:
 Pembimbing

(Syafrudin S.Sos.M.H)
 NIDN: 0130056601

Pemohon

(Neys)



SK-4 UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 431/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 07 Maret 2024
 Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Laboratorium FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
13	NEYS	2003100042	NALLI KHARIQAH, S.I.P., M.Pd.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	PERAN PELAYANAN PARTISIPATIF DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNG BALAI
14	ZAHWA BEZA MAFIZA SARI	2003100023	NALLI KHARIQAH, S.I.P., M.Pd.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM POSYANDU BALITA DI DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG
15	RINI ASTUTI	2003100045	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	NALLI KHARIQAH, S.I.P., M.Pd.	EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM MENGURANGI RESIKO STUNTING
16	NABILA MUJITAZA NASUTION	2003100066	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	NALLI KHARIQAH, S.I.P., M.Pd.	FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL LURAH DALAM PROGRAM SERAM (SESER SAMPAH MALAM) DI KECAMATAN HELVETIA TENGAH KECAMATAN MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN
17	NILAM PERMATA DEWI DAMAHIK	2003100055	A-FARI AL-QUDUS, S.Sos., M.Si.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA	FUNGSI COORDINATING KEMPOR MAJUANA NAGORI DALAM MENETAPKAN PRIORITAS SKALA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BAHUNG HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Medan, 24 Syaaban 1445 H
05 Maret 2024 M


 (Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.)


PEDOMAN WAWANCARA

DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

Me Pumb
Sh 22/2021
 13

Berikut merupakan daftar wawancara yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah pada penelitian dengan judul “ PERAN PELAYANAN PARTISIPATIF DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNG BALAI. Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara:

Daftar pertanyaan yang ditujukan kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang diwakili oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

A. Adanya Pelayanan

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh dinas kesehatan dalam penanggulangan stunting?
2. Apakah pelayanan tersebut sudah sesuai dengan tupoksi yang ada?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pelayanan terhadap penanggulangan stunting?

B. Adanya Koordinasi

1. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam mengkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan stunting?
2. Koordinasi seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam penanggulangan stunting?
3. Apa kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam melakukan koordinasi dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Adanya Tanggung Jawab

1. Apakah Dinas Kesehatan sudah melakukan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi dalam penanggulangan stunting?
2. Kepada siapa tanggung jawab dibebankan dalam pelaksanaan program stunting?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam penanggulangan stunting?

D. Adanya Kontribusi

1. Siapa yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan penanggulangan stunting?
2. Bagaimana bentuk kontribusi yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam penanggulangan stunting?
3. Apa kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam menjalankan kontribusi terhadap penanggulangan stunting?

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mengab surat ini agar disubukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 596/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 22 Ramadhan 1445 H
01 April 2024 M

Kepada Yth : Kepala Kesbangpol Tanjung Balai
di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : NEYS
N P M : 2003100042
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **PERAN PELAYANAN PARTISIPATIF DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNG BALAI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN 0030017402



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN


**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS KESEHATAN**

Jl. Gereja No. 2B, Kode Pos 21311
Telp: (0623) 92033, Fax: (0623) 94139

Tanjungbalai, 3 Mei 2024

Nomor : 800/1000/Um.kp/V
Sifat : Bebas
Hal : Balasan Surat Penelitian

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Menindak lanjuti Surat izin Survey awal dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Nomor 000.9.6.1/0516/Bapperida/2024,

Berkenaan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa :

Nama : NEYS

NIP/NIM/NIK : 2003100042

Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Judul : Peran Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

telah selesai melaksanakan riset di Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Diketahui,
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tanjungbalai



dr. H. Nurhajah Arjonga, M.Kes
NIP. 197109192003122005

SURAT KETERANGAN BEBAS PERPUSTAKAAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX/2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP. 1271202D1090003 | <http://perpustakaan.umsu.ac.id> | perpustakaan@umsu.ac.id | [perpustakaan_umsu](https://www.perpustakaan_umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01031/KET/II.5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : NEYS
NPM : 2003100042
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpadu

Medan, 9 Zulqaidah 1445 H
 17 Mei 2024 M

Kepala Perpustakaan,

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

LoA KESKAP



Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN
No. 736/KET/KESKAP/V/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Neys
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Peran Pelayanan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai
Jumlah Halaman : 8 Halaman
Penulis : Neys, Syafruddin

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 Mei 2024

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

SK-10 UNDANGAN PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul Cerdas, Terpercaya

UNDANGAN PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 963/JUND/III.3.AU/UMSU-Q3/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Sabtu, 30 Mei 2024
 Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt.2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	THASYA ARSETYA	2003100024	IDA MARTINELLY, SH, M.M	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI DIRECTING SATPOL PP DALAM PENYATAAN DAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DELI SERDANG
2	EKA LESTARI	1803100072	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.	IDA MARTINELLY, SH, M.M	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN LARANGAN DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN
3	FAZA STEVANI	2003100049	IDA MARTINELLY, SH, M.M	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KANTOR CAMAT HATONDUHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
4	ALVITA SAHRAH	2003100057	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELATARAN PARKIR DI TEPI JALAN JUMUM DI KOTA MEDAN
5	NETS	2003100042	DEDI AMRIZAL, S.Soc., M.Si	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	PERAN PELAYANAN PARTISIPATIF DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGPINANG

Menulis Sidang:

1.

Tgl. : 19/05/24
 20/05/24

Medan, 20 Dzulhijjah 1445 H
 28 Mei 2024 M

Dijabang oleh:
 Prof. Dr. Alimuddin ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua:
 Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

INFORMASI PRIBADI

Nama lengkap : Neys
 Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 04 Agustus 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jln. Kemudi Lk. VII
 Agama : Islam
 Nama Orang Tua
 Ayah : Rais
 Ibu : Netti
 No. Hp : 081262420076
 Email : putrineys@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 2003100042
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Kapten Muchtar Basri No.3 Medan 20238

PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD N 130004 Teluk Nibung (2008-2014)
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Sisingamangaraja Tanjungbalai (2014-2017)
 Sekolah Menengah Akhir : SMA Sisingamangaraja Tanjungbalai (2017-2020)
 Demikianlah daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan semestinya.

Penulis

Neys